

INTISARI

Pemerintah daerah dalam menyusun anggaran keuangan menetapkan defisit atau surplus dapat dipenuhi melalui pembiayaan keuangan, baik dari penerimaan pembiayaan ketika anggaran diperkirakan defisit ataupun pengeluaran pembiayaan ketika anggaran diperkirakan surplus. Akan tetapi, kondisi pemerintah daerah di Indonesia saat ini mengalami kendala dalam pelaksanaan rencana keuangan yang ditunjukkan dengan besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tiap akhir periode anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Kurang Belanja Modal (SKBM) terhadap timbulnya SILPA serta dampak yang ditimbulkan SILPA terhadap indikator ekonomi regional. Alat analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis regresi data panel yang terdiri dari gabungan data *time-series* berupa tahun penelitian dari 2011 - 2015 dan data *cross-section* berupa wilayah penelitian yang terdiri dari 206 kabupaten dan kota di Indonesia dengan rata-rata SILPA tertinggi selama 5 tahun.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa komponen manajemen pendapatan pemerintah daerah berupa DAU memiliki korelasi yang sedang (0.378), DAK memiliki korelasi lemah (-0.108) dan komponen manajemen belanja pemerintah daerah berupa SKBM memiliki korelasi kuat (0.746) terhadap timbulnya SILPA. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Indonesia periode 2011 – 2015. Terbentuknya SILPA pada akhir periode anggaran tersebut menjadi penanda bahwa komitmen rencana keuangan yang disusun pada awal perencanaan belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci : SILPA, DAU, DAK, SKBM, Pertumbuhan Ekonomi, Data Panel.

ABSTRACT

Local governments in drafting a budget deficit or surplus can be met through financial financing, either from the revenue financing when the budget is predict to deficit or expenditure financing when the budget is estimate to be surplus. However, condition of the local governments in Indonesia is currently experiencing constraints in the implementation of the financial plan as indicate by the amount of Remaining Budget Surplus (SILPA) at the end of each budget period. The purpose of this research is to know the correlation between General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Lest Rest Capital Expenditure (SKBM) on the appearance of SILPA and the impact of SILPA on regional economic indicators. The analysis tool use is correlation analysis and panel data regression analysis consisting that combine time-series data in the form of research years from 2011 to 2015 and cross-section data in the form of research area consist of 206 regencies and cities in Indonesia with the highest average SILPA for 5 years.

The result of correlation analysis shows that the component of local government revenue management in the form of DAU has medium correlation (0.378), DAK has weak correlation (-0.108) and component of local government expenditure management in the form of SKBM has strong correlation (0.746) to appearance of SILPA. The result of panel data regression analysis shows that SILPA has no effect on economic growth in districts and cities in Indonesia period 2011 – 2015. The establishment of SILPA at the end of the budget period marks that the commitment of the financial plan was prepared at the begining of planning is not implement.

Keywords : SILPA, DAU, DAK, SKBM, Economic Growth, Panel Data.